

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin (Septy & Devega, 2022). Dan ini terbukti cukup berhasil dalam membantu ekonomi masyarakat-masyarakat miskin di negara negara berkembang, tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. implementasi dari BLT ini sendiri memberikan keleluasaan bagi pemerintah nagari atau untuk dapat menentukan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan BLT.

Dalam menentukan keputusan calon penerima bantuan BLT, pegawai harus mengumpulkan data Penerima bantuan, dari data masyarakat yang berasal kurang mampu. Hal ini berdampak adanya bentuk subjektifitas di dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai, terutama jika beberapa calon penerima memiliki tingkat kelayakan yang tidak jauh, oleh karena itu dibutuhkannya sebuah Sistem Pengambilan Keputusan dalam menentukan penerima bantuan BLT.

Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manager dalam pengambilan keputusan (Andi Firmanto, 2014). Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan

dalam situasi semi terstruktur dan situasi tidak terstruktur, dimana tidak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Handayani & Hariyanti, 2022). Untuk itu diperlukan suatu Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) yang dapat memperhitungkan segala kriteria, yang mendukung Pengambilan keputusan sehingga dapat berguna membantu, mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis didalam melakukan penelitian ini, penulis ingin membuat solusi dari permasalahan yang dapat membantu pihak Kantor Wali Nagari Tigo Sakato dalam menentukan calon penerima bantuan BLT, dimana tidak semua masyarakat yang berasal dari keluarga miskin, sehingga dalam penyeleksian calon Penerima bantuan BLT harus memerlukan Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) memanfaatkan metode *Simple Additive Weight* (SAW). maka dalam hal ini akan membantu pihak Kantor Wali Nagari dalam menentukan calon penerima Bantuan BLT tersebut.

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode sederhana dalam Sistem Pengambilan Keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur (Serelia & Adin Saf, 2020). konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu skala yang dapat di perbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (A. S. Putra et al., 2018). Dalam hal ini alternatif yang dimaksud yaitu masyarakat yang layak menerima bantuan BLT berdasarkan kriteria-kriteria yang di tentukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan *Metode Simple Additive Weighting* (SAW) dalam Sistem Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Masyarakat yang Layak Mendapatkan Bantuan BLT” penulis ingin membantu pegawai Kantor Wali Nagari untuk bantuan BLT dalam Sistem Pengambilan Keputusan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan BLT di Kantor Wali Nagari Tigo Sakato, Taluk, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis membuat perumusan masalah yang akan di selesaikan yaitu :

1. Bagaimana membangun sebuah Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) yang dapat membantu kantor Wali Nagari Tiga Sakato dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat agar dapat dilakukan dengan cepat dan akurat ?
2. Bagaimana menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Tigo Sakato, agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat ?
3. Bagaimana data dapat diproses dan disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Tigo Sakato?

1.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diberikan beberapa hipotesis terhadap permasalahan yang dihadapi, maka peneliti mengemukakan :

1. Diharapkan dengan membangun Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) yang dapat membantu kantor Wali Nagari Tiga Sakato dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan akurat dalam mengatasi masalah Semi Terstruktur.
2. Diharapkan dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang mampu menjumlahkan pembobotan dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Tigo Sakato, agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL data dapat diproses dan disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Tigo Sakato.

1.4 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dimaksudkan penulis tidak meluas dan lebih terarah serta mudah dipahami, maka diperlukan adanya pembatasan permasalahan, yaitu:

1. Aplikasi SPK ini dibuat dengan ruang lingkup penentuan layaknya bantuan BLT di Kantor Wali Nagari yang hanya bertujuan untuk menentukan Masyarakat yang layak menerima bantuan BLT.

2. Sistem Pengambilan Keputusan ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
3. Perancangan Sistem Pengambilan Keputusan ini menggunakan bahasa Pemrograman PHP dan database MySQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam membuat skripsi ini dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai adalah :

1. Untuk merancang dan membuat sebuah sistem pengambilan keputusan bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menggunakan metode SAW yang dapat mengolah kriteria dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Menerapkan metode SAW untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih efisien dan lebih tepat sasaran.
3. Mempermudah pegawai kantor wali desa dalam pemilihan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan BLT.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Wali Nagari Tigo Sakato dalam menyeleksi Masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam penyelesaian berbagai masalah multikriteria.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Pihak Akademik

Secara tidak langsung telah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pendidikan dan makalah yang dihasilkan dari skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penerapan ilmu komputer khususnya pemrograman dan skripsi bagi mahasiswa lainnya.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan mahasiswa dapat membuat aplikasi penunjang pengambilan keputusan penerima bantuan BLT .

3. Bagi Instansi

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerima Bantuan Langsung Tunai.
- b. Memberikan kemudahan dalam setiap pemilihan masyarakat yang layak dalam menerima bantuan BLT.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum ini penulis mendapatkan data melalui metode observasi dan wawancara bahwasanya penulis mendapatkan data diantaranya yaitu berupa data primer. Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang perusahaan atau organisasi yang merupakan objek penelitian, mulai dari sejarah singkat, struktur organisasi serta tugas dan wewenang.

1.7.1 Sejarah Kantor Wali Nagari Tigo Sakato

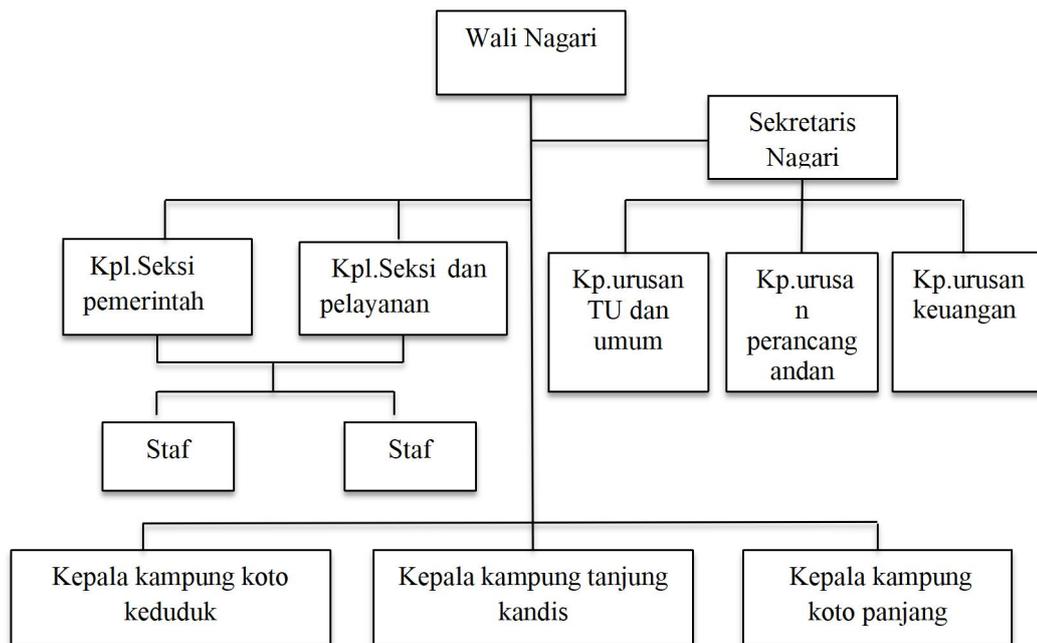
Asal mulanya Nagari Tigo Sakato adalah mekaran dari Nagari Taluk yang terdiri dari 3 (Tiga) Kampung yaitu Kampung Koto Keduduk Kampung Tanjung Kandis Kampung Koto Panjang Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2001, dimana Pemerintah Terendah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Nagari. Maka Pemerintahan Nagari kembali menjadi sebuah Nagari, melalui kesepakatan pemuka masyarakat dan KAN Nagari maka di angkat Bapak AFRIJON, SH menjadi Penjabat sementara Wali Nagari Tigo Sakato. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2011, Tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tigo Sakato, kemudian pada Tanggal 8 Desember 2011 dilaksanakan Pemilihan Wali Nagari Devinitif.

Berdasarkan Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/455 /Kpts/ BPT PS/2011 tentang pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Se - Kecamatan Batang Kapas. Tanggal 28 Desember 2011 dilantik Wali Nagari terpilih yaitu Bapak EFRIADI, S.Ag sebagai Wali Nagari Tigo Sakato pada Tanggal 28 Desember 2017 berakhirilah masa jabatan Wali Tigo Sakato atas nama Bapak Efriadi, S.Ag dan diserahkan Jabatannya kepada Penanggung Jawab Sementara Bapak Raja Ratman, SE. dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/272/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada Tiga Nagari di Kecamatan Batang Kapas Tanggal 11 Mei 2018 dan dilantik Wali Nagari terpilih yaitu Bapak Nofriandi sampai saat ini.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan tugas dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masingnya berlangsung seperti yang diharapkan sehingga tujuan dapat tercapai. Jadi, organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun bentuk struktur organisasi pada Kantor Wali Nagari Tigo Sakato dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI WALI DESA TIGO SAKATO



Sumber : Kantor Wali Nagari Tigo sakato,kecamatan Batang kapas,pesisir selatan

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Tigo Sakato

1.7.3 Aktifitas pada bagian Kepegawaian

Adapun pembagian tugas dan wewenang yang ada pada Kantor Wali Nagari Tigo Sakato sebagai berikut :

1. Wali Nagari bertugas
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
 - d. menetapkan Peraturan Nagari
 - e. membina kehidupan masyarakat Nagari.
 - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian serta
 - h. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat.
 - i. mengembangkan sumber pendapatan.
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat.
2. sekretaris Nagari
 - a. Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.
 - b. Sekretaris Nagari bertugas membantu Kepala Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas.

- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat.
 - c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi Pemerintahan Nagari.
 - d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat.
 - e. Penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan Kantor.
 - f. Penyiapan rapat-rapat.
 - g. Pengadministrasian aset nagari.
 - h. Pengadministrasian Inventarisasi Nagari.
4. Kepala Urusan Perancangan dan Keuangan
- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan.
 - b. Menyusun RAPB.
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
 - d. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan
- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Nagari.
 - b. Menyusun rancangan regulasi.
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
 - d. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
 - e. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
 - f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah nagari.
 - g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Nagari.
6. Kepala Seksi kesejahteraan dan Layanan
- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya.

- b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik.
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.
 - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga.
 - f. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
 - g. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
 - h. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.
7. Staf
- a. Membantu pekerjaan kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan
8. Kepala kampung/dusun
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.